UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENOLAKAN REPATRIASI EKS-ANGGOTA ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
DONEL ROY S S, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Agus SB, 2014, *Darurat Terorisme-Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, Daulat Press, Jakarta.

Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, dan H. Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid ll*, Konstitusi Pers, Jakarta.

_____, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet. kedua, Konstitusi Press, Jakarta.

_____, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta.

_____, 2000, *Kapita Selekta Teori Hukum, Kumpulan Tulisan Tersebar*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Azinovic, V. and M. Jusic, 2016, *The Lure of the Syrian War: The Foreign Fighters' Bosnian Contingent*, The Atlantic Initiative, Sarajevo.

Butarbutar, E., 2018, *Metode Penelitian Hukum;Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.

Chourmain, Imam, 2008, *Acuan Normatif Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Al-Haramain Publishing House, Jakarta.

Effendi, Sofia, 2012, *Metode Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Farid, Andi Z A., 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hazawi, Adami., 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENOLAKAN REPATRIASI EKS-ANGGOTA ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
DONEL ROY S S, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Ibrahim, Johny, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.

Kelsen, Hans, 2018, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.

_____, 2017, *Teori Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Somardi (Penerjemah), Bee Media Indonesia, Jakarta.

_____, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Normatif, Prinsip-Prinsip Teoritis Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Hukum Dan Politik*, Nusa Media, Jakarta.

Marbawi, Mahnan, *et al.,* 2019, *Mencipta Generasi Penjaga Kebhinekaan-Panduan Sekolah Damai, Konsep dan Indikator*, The Wahid Foundation, Jakarta.

M. N. Shaw QC, 2013, *Hukum Internasional*, Derta Sri Widowatie, *et al* (Penerjemah), Edisi Keenam, Nusa Media, Bandung.

M. S. Victor, 2002, *Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengatasi Masalah Terorisme, dalam Terorisme dan tata dunia baru*, Tim Peneliti Hubungan Internasional Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I) DPR RI, Jakarta.

M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nainggolan, Poltak Partogi., 2019, *Kekhalifahan ISIS di Asia Tenggara*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Nugraha, Safri, *et al*., 2007. *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.

Paulus, B. P., 1983, *Kewarganegaraan RI ditinjau dari UUD 1945*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Prasetyo, Teguh., 2010, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Nusamedia, Bandung.

Ranawijaya, Usep, 1983, *Hukum Tata Negara Indonesia, Dasar-dasarnya, Penerbit Ghalia Indonesia*, Jakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENOLAKAN REPATRIASI EKS-ANGGOTA ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
DONEL ROY S S, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Rawls, John., 1999, *A Theory of Justice*, Revised Edition, the belknap press of Harvard university press cambridge, Massachusetts.

Saleh, Roeslan., 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan*, Aksara Baru, Jakarta.

Soerjono, Soekanto., 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

_____, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

_____., dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Soetoprawiro, Koerniatmanto., 1996, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sunggono, Bambang., 1997, *Metodologi penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suratman dan H. Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum,* Alfabeta, Jakarta.

V. Azinovic dan M. Jusic, 2016, *The Lure of the Syrian War: The Foreign Fighters' Bosnian Contingent*, The Atlantic Initiative, Sarajevo.

Yamin, Muhammad., 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Yudhoyono, S. Bambang., 2002, *Selamatkan Negara Kita Dari Terorisme-Save Our Country From Terrorism*, Cetakan Pertama, Kementrian Koordinator Polkam, Jakarta.

B. Artikel Jurnal.

Andina, Elga., "Wacana Pemulangan Anak-Anak Kombatan ISIS", *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI-Bidang Kesejahteraan Sosial, Info singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol.XII, No.4/II/Puslit/Februari/2020.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENOLAKAN REPATRIASI EKS-ANGGOTA ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
DONEL ROY S S, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Brotosumpeno, Hendra K., 2018, "Potensi Ancaman *Foreign Terrorist Fighters* (*FTF*) Bagi Ketahanan Nasional Dan Keamanan Nasional Indonesia (Studi Kasus: WNI Yang Bergabung Dengan ISIS di Suriah", *Cendekia Waskita-Jurnal Kajian Strategis, Kajian Intelijen STIN*, Vol.2, No.1, Mei 2020.

Bytyqi, Kujtim dan Sam Mullins, "Returnee Foreign Fighters from Syria and Iraq: The Kosovan Experience," *CTC Sentinel*, Vol. 12, No. 8, 2019.

Candra, Septa., "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013.

Diamantina, Amalia., 2014, "Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam Menjamin Hak Kewarganegaraan Perempuan", *MMH*, Jilid 43 No.1, Januari 2014.

Hanne Cuyckens dan Christophe Paulussen, "The Prosecution of Foreign Fighters in Western Europe: The Difficult Relationship Between Counter-Terrorism and International Humanitarian Law," *Oxford Academic Journal of Conflict and Security Law*, Vol. 24, No. 3, Desember, 2019.

Hegghammer, Thomas., "The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad" *JSTOR, International Security*, WINTER 2010/11, Vol. 35, No. 3, November 2010.

_____,"Should I Stay or Should I Go? Explaining Variation in Western Jihadist' Choice between Domestic and Foreign Fighting." *American Political Science Review 107*, No. 1, 2013.

Latifah, Marfuatul., 2018, "Perlindungan HAM dalam Prosedur Penentuan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris di Indonesia", *Negara Hukum,*Vol.9, No.1, Juni 2018.

Mantu, Sandra., "'Terrorist' citizens and the human right to nationality", *Journal of Contemporary European Studies*, Vol. 26, No. 1, 2019.

Nasution, Aulia R., 2015, "Terorisme di Abad ke -21 Upaya penegakan hokum terhadap tindak kejahatan terorisme dalam Perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia", *Jurnal Mercatoria*, Vol.8, No.1.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENOLAKAN REPATRIASI EKS-ANGGOTA ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
DONEL ROY S S, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pratiwi, Dian K., "Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut Di Wilayah Indonesia", *Jurnal Selat*, Vol. 5 No. 1, Oktober 2017.

P. Schmid, Alex., "International Centre for Counter-Terrorism-The Houge: Foreign (Terrorist) Fighter Estimates: Conceptual and Data Issues," *ICCT Policy Brief*, October 2015.

Setiawan, Hari H., *et.al*., "Anak Sebagai Pelaku Terorisme dalam Perspektif Ekologi Sosial", *Sosio Informa*, Vol. 6 No. 03, September – Desember 2020.

Suhayati, Monika., "Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *NEGARA HUKUM*: Vol. 4, No. 2, November 2013.

Tabiu, Ramadan dan Eddy O.S Hiariej, "Pertentangan Asas Legalitas Formil dan Materiil Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No.1, Maret 2015.

Tim Peneliti The Habibie Center, "Tantangan dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS", *Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan, Edisi 05*, Agustus 2018.

Vilano, Danur., "Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terorisme Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana", *e Jurnal Katalogis*, Vol.5 No.3, Maret 2017.

Wolf, Anne van der., "The Denial of Identity Cards to Islamic State Affiliates: a Recipe for Renewed Radicalisation?" *JSTOR, Midle East Research Institute*, Vol.4 No.31, May 2019.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir.

Ayutama, Ola A., 2018, *Kebijakan Formulasi Terhadap Foreign Terrorist Fighter di Indonesia*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Damanik, Deardo, 2020, *Pencabutan Status Kewarganegaraan Eks-Anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) oleh Negara Asal Ditinjau Berdasarkan Konvensi 1961 tentang Pengurangan orang-orang tanpa kewarganegaraan (studi kasus: pencabutan status kewarganegaraan inggris shamima begum)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENOLAKAN REPATRIASI EKS-ANGGOTA ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
DONEL ROY S S, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Gunarto, Marcus P., 2008, *Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Hasibuan, Hoiruddin, 2017, *Reformasi Kebijakan Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Tarigan, Molan, 2007, *Politik Hukum Kewarganegaraan terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia (1945-2006)*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta.

D. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENOLAKAN REPATRIASI EKS-ANGGOTA ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
DONEL ROY S S, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENOLAKAN REPATRIASI EKS-ANGGOTA ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
DONEL ROY S S, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang (Berita Negara Republik Nomor 1411 Tahun 2018).

Montevideo Convention on the Rights and Duties of States. *Signed at Montevideo, 26 December 1933.Entered into Force, 26 December 1934. Article 8 reaffirmed by Protocol, 23 December 1936*

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Additional Protocol to The Council of European Convention on Prevention of Terrorism 2015.

Restatement (Third) of the foreign Relations Law of United States.

E. Hasil Wawancara.

Suntoro, Agus., (Peneliti HAM pada Biro Pemajuan HAM, Komnas HAM RI), 2021, Penolakan Repatriasi Eks *Islamic State of Iraq And Syria* (ISIS) Dan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM), *Wawancara*, 24 Juni 2021.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENOLAKAN REPATRIASI EKS-ANGGOTA ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
DONEL ROY S S, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sabar, Alexander., (Kasubdit Intelijen pada Direktorat Penindakan BNPT), 2021, Penolakan Repatriasi Eks *Islamic State of Iraq And Syria* (ISIS) Dan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM), *Wawancara*, 15 Juli 2021.

F. Putusan dan Penetapan Pengadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Brt Tanggal 19 Juli 2018 dengan Terdakwa: DWI DJOKO WIWOHO alias ABU BAKAR alias ABU KHONSAH.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, terkait Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.

G. Makalah/Pidato/Diskusi Publik.

Asshiddiqie, Jimly, 2011, Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum Keindonesiaan, *Makalah*, Panitia Simposium tentang Ke-Indonesiaan dan Kewargenagaran Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, Oktober 2011.

Milda Istiqomah, Penghukuman bagi Pelaku Teror: Adil dan efektifkah?, *Diskusi Publik Merespon Terorisme*, FISIP Departemen Kriminologi UI, Kamis 8 April 2021, 16.00 s.d. 18.00 WIB.

Moelyatno, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana”, *Pidato Ilmiah*, dalam Dies Natalis Universitas Gadjah Mada tahun 1955.

H. Internet.

AA.com, “WNI eks-anggota ISIS/Daesh berharap pulang di tengah pro kontra ancaman terorisme”, *https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/wni-eks-anggota ISIS-daesh-berharap-pulang-di-tengah-pro-kontra-ancaman-terorisme/1729214*, diakses 28 Februari 2021.

Akurat.co., “Perpres Nomor 7 Tahun 2021 Respon Cepat Negara Atasi Terorisme”, *https://akurat.co/perpres-7-tahun-2021-respon-cepat-negara-atasi-terorisme*, diakses 21 April 2021.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENOLAKAN REPATRIASI EKS-ANGGOTA ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
DONEL ROY S S, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Alex P.Schmid, "International Centre for Counter-Terrorism-The Houge : Foreign (Terrorist) Fighter Estimates: Conceptual and Data Issues, ICCT Policy Brief October 2015", *http://icct.nl/app/uploads/2015/10/ICCT-Schmid-Foreign-Terrorist-Fighter-Estimates-Conceptual-and-Data-Issues-October20152.pdf*, diakses 12 Juli 2021.

ANTARA SUMBAR, "Soal pemulangan WNI eks-anggota ISIS, ini penegasan Presiden Jokowi", *https://sumbar.antaranews.com/berita/325394/soal-pemulangan-wni-eks-anggota ISIS-ini-penegasan-presiden-jokowi*, diakses 21 April 2021.

Ballentine's Law Dictionary., *https://openjurist.org/law-dictionary/repatriation Ballentine's Law Dictionary*, diakses 01 November 2020.

Black's Law Dictionary: 2nd Edition., *https://openjurist.org/law-dictionary/repatriation Black's Law Dictionary: 2nd Edition*, diakses 01 November 2020.

BPS, "Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020", *https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html*, diakses 22 April 2021.

CNBC Indonesia., "Resmi! RI Tolak Pulangkan 689 WNI Eks-anggota ISIS ke Tanah Air", *https://www.cnbcindonesia.com/news/20200212104432-4-137202/resmi-ri-tolak-pulangkan-689-wni-eks-anggota ISIS-ke-tanah-air*, diakses 1 Mei 2020.

CNN Indonesia., "Yasonna: Data Terbaru Ada 1.276 WNI Eks-anggota ISIS di Luar Negeri", *https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200225163222-20-477996/yasonna-data-terbaru-ada-1276-wni-eks-anggota ISIS-di-luar-negeri,* diakses 14 April 2020.

_____, Polemik WNI Eks-anggota ISIS dan Aturan Kehilangan Kewarganegaraan, *https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200214113641-20-474581/polemik-wni-eks-anggota ISIS-dan-aturan-kehilangan-kewarganegaraan*, diakses 26 April 2021.

_____, 2021, DPR Desak Percepat Implementasi Perpres Ekstremisme-Terorisme,

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENOLAKAN REPATRIASI EKS-ANGGOTA ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
DONEL ROY S S, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210401163404-32-625018/dpr-desak-percepat-implementasi-perpres-ekstremisme-terorisme, diakses 20 April 2021.

Council of Europe Treaty Series - No. 217, 2015, Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism, *https://rm.coe.int/168047c5ea*, diakses 29 Juni 2021.

Counter Terrorism Implementation Task Force, "Basic Human Rights Refference Guide: Right to a Fair Trial and Due Process in the Context of Countering Terrorism" Oktober 2014, *https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/fairtrial.pdf*, diakses 28 Februari 2021.

Detiknews, Prof Hikmahanto Beberkan Alasan WNI yang Ikut ISIS Hilang Kewarganegaraannya, *https://news.detik.com/berita/d-4887915/prof-hikmahanto-beberkan-alasan-wni-yang-ikut-isis-hilang-kewarganegaraannya/2*, diakses 26 April 2021.

Dan Sabbagh, "*Britain must repatriate Isis fighters, warns US defence", https://www.theguardian.com/world/2019/sep/06/britain-must-repatriate-isis-fighters-warns-us-defence-secretary*, diakses 30 Juni 2021.

Edward Lemon, "Central Asia brings foreign fighters' families home, but what next?", *https://www.opendemocracy.net/en/odr/returnees-central-asia/*, diakses 30 Juni 2021.

Geneva Academy, October 2014, "Foreign Fighters under International Law", *https://www.geneva-academy.ch/docs/publications/Briefings%20and%20In%20breifs/Foreign%20Fighters%20Under%20International%20Law%20Briefing%20no7.pdf*, diakses 06 Februari 2021.

Hague Convention - Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws (1930), Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws, 12 April 1930, 179 L.N.T.S. 89 (LoN-4137) (entered into force 1 July 1937)., *http://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280046354*, diakses 11 Juli 2021.

H.J. Mai, "Why European Countries Are Reluctant To Repatriate Citizens Who Are ISIS Fighters", *https://www.npr.org/2019/12/10/783369673/europe-remains-reluctant-to-repatriate-its-isis-fighters-here-s-why*, diakses 1 Juli 2021.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENOLAKAN REPATRIASI EKS-ANGGOTA ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
DONEL ROY S S, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Faiz, Pan M., "Memaknai *Salus Populi Suprema Lex"*, *https://panmohamadfaiz.com/2020/09/03/memaknai-salus-populi-suprema-lex/*, diakses 22 April 2021.

_____, "Teori Keadilan John Rawls", *https://panmohamadfaiz.com/2009/04/28/profil-tokoh-john-rawls-1921-2002/*, diakses 26 April 2021.

Huda, Sholihul., "Respon Aktivis Mahasiswa Terhadap Gerakan Islam Radikal (ISIS)" *https://www.academia.edu*, diakses 21 April 2021.

Institute For Criminal Justice Reform, "ICJR: Sebagai Negara Hukum, Pemerintah Harus Punya Opsi Lain Soal WNI Simpatisan ISIS", *https://icjr.or.id/icjr-sebagai-negara-hukum-pemerintah-harus-punya-opsi-lain-soal-wni-simpatisan-isis/#:~:text=Resources-,ICJR%3A%20Sebagai%20Negara%20Hukum%2C%20Pemerintah%20Harus%20Punya%20Opsi,Lain%20Soal%20WNI%20Simpatisan%20ISIS&text=Dalam%20hal%20ini%20setidaknya%20ada,opsi%20untuk%20diadili%20di%20Indonesia*, diakses 27 April 2021.

Institute for Economics & Peace (IEF)., 2020, "Global Terrorism Index 2020, Measuring the Impact of Terrorism", *https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf*, hlm 8-9, diakses 20 April 2021.

Iqbal Basyari, Kompas., 2021, "Politik dan Hukum Lawan Konten Radikal di Media Sosial", *https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/04/19/lawan-konten-radikal-di-media-sosial/*, Diakses tanggal 20 April 2021.

KabarKota.com, "PSKP UGM: Pemulangan WNI eks-anggota ISIS perlu Pertimbangkan banyak Aspek" *https://kabarkota.com/pskp-ugm-pemulangan-wni-eks-anggota ISIS-perlu-pertimbangkan-banyak-aspek/*,diakses 19 Desember 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan). *https://kbbi.web.id/repatriasi*, diakses 16 Desember 2020.

Kementerian Luar Negeri RI, "Hubungan Bilateral Indonesia-Suriah", *https://kemlu.go.id/damascus/id/pages/hubungan-bilateral-indonesia-suriah/2886/etc-menu*, diakses 18 Februari 2021.

_____, "Anggota PBB Kembali Percayakan Indonesia menjadi Anggota Dewan HAM PBB", *https://kemlu.go.id/portal/id/read/693/berita/anggota-pbb-kembali-*

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENOLAKAN REPATRIASI EKS-ANGGOTA ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
DONEL ROY S S, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

percayakan-indonesia-menjadi-anggota-dewan-ham-pbb, diakses 1Juli 2021.

KPAI, "KPAI: Negara Harus Lindungi Anak-anak WNI Eks-anggota ISIS", *https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-negara-harus-lindungi-anak-anak-wni-eks-anggota ISIS*, diakses 28 April 2021.

Liputan6.com, "Hikmahanto: WNI Eks-anggota ISIS Telah Kehilangan Kewarganegaraannya", *https://www.liputan6.com/news/read/4173299/hikmahanto-wni-eks-anggota ISIS-telah-kehilangan-kewarganegaraannya#*, diakses 26 April 2021.

_____, "Jokowi Dinilai Tak Perlu Keluarkan Keppres untuk Cabut Kewarganegaraan Eks ISIS", *https://www.liputan6.com/news/read/4182287/jokowi-dinilai-tak-perlu-keluarkan-keppres-untuk-cabut-kewarganegaraan-eks-anggota ISIS*, diakses 28 April 2021.

Leonardi, Dennis F., LK2 FH UI, "Persebaran Ideologi Isis Setelah Kekalahan", *https://lk2fhui.law.ui.ac.id/persebaran-ideologi-isis-setelah-kekalahan/#*, diakses 15 Februari 2021.

M. Wahid., "Eks-anggota ISIS: Bukan Sekedar Pemulangan", *https://news.detik.com/kolom/d-4916644/eks-anggota ISIS-bukan-sekadar-pemulangan*, diakses 18 April 2021.

Nurhanisah, Yuli., Indonesia baik.id, "Indonesia Tidak Sendiri Menolak Eks ISIS", *https://www.indonesiabaik.id/infografis/indonesia-tidak-sendiri-menolak-eks-anggota ISIS*, diakses 1 Juli 2021.

Pandusurya, Wijaya., Merdeka.com, , "Kaleidoskop 2019 Akhir Riwayat Sang Khalifah ISIS", *https://www.merdeka.com/dunia/akhir-riwayat-sang-khalifah-isis-kaleidoskop-2019.html*, diakses 15 Februari 2021.

Ratnadi, Cynthia., "Tinjauan Yuridis Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 79/PUU-IX/2011", *https://e-resources.perpusnas.go.id:2153/media/publications/34497-ID-tinjauan-yuridis-keputusan-presiden-nomor-159m-tahun-2011-pasca-putusan-mahkamah.pdf*, diakses 28 April 2021.

Saifulmuljani.com., "Rakyat Indonesia menolak Khilafah ISIS dan HTI", *https://saifulmujani.com/rakyat-indonesia-menolak-khilafah-isis-dan-hti/*, diakses 18 April 2021.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENOLAKAN REPATRIASI EKS-ANGGOTA ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
DONEL ROY S S, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Saraswati, A.A.A. Nanda., CRCS UGM, "Kembalinya Eks-anggota ISIS: Antara Keamanan Nasional dan Perlindungan HAM", *https://crcs.ugm.ac.id/kembalinya-eks-anggota ISIS-antara-keamanan-nasional-dan-perlindungan-ham/*, diakses 16 Desember 2020.

Suara.com., "1.250 Warga Indonesia Berangkat ke Irak dan Suriah Gegara Pengaruh Radikal", *https://www.suara.com/news/2021/02/05/182035/1250-warga-indonesia-berangkat-ke-irak-dan-suriah-gegara-pengaruh-radikal*, diakses 26 April 2021.

Tagar.id., "Pengamat Sebut Negara Berhak Tangkal ISIS Eks WNI- Negara berhak melakukan penangkalan terhadap ISIS eks WNI untuk pulang ke Indonesia demi melindungi warga di dalam negeri", *https://www.tagar.id/pengamat-sebut-negara-berhak-tangkal-isis-eks-wni*, diakses 24 April 2021.

Tribunnews.com., "Dengan Perpres RI No 7 Tahun 2021 Tanggulangi Terorisme, BNPT Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan", *https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/01/18/dengan-perpres-ri-no-7-tahun-2021-tanggulangi-terorisme-bnpt-libatkan-seluruh-pemangku-kepentingan*, diakses 21 april 2021.

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), "Expert Meeting - Interpreting the 1961 Statelessness Convention and Avoiding Statelessness resulting from Loss and Deprivation of Nationality ("Tunis Conclusions"), March 2014", *https://www.refworld.org/docid/533a754b4.html*, diakses 2 Juli 2021.

United Nations Security Council, "Resolution 2178 (2014): Adopted by the Security Council at its 7272nd meeting, on 24 September 2014, S/RES/2178 (2014)", *www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2014/shtml*, diakses 05 Februari 2021.

VOA Indonesia, "PBB Peringatkan Pemimpin ISIS Sedang Persiapkan Serangan Baru dari Irak", *https://www.voaindonesia.com/a/pbb-peringatkan-pemimpin-isis-sedang-persiapkan-serangan-baru-dari-irak/5021375.html* , diakses 18 Februari 2021.

www.kompas.id., "Bukan Rumah Bagi Terorisme", *https://www.kompas.id/baca/lain-lain/2020/12/02/bukan-rumah-bagi-terorisme?status_login=login*, diakses 22 April 2021.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENOLAKAN REPATRIASI EKS-ANGGOTA ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
DONEL ROY S S, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

YS, Berita Satu, "Survei Wahid Foundation: 86% Aktivis Rohis Ingin Berjihad ke Suriah", *https://www.beritasatu.com/megapolitan/414934/survei-wahid-foundation-86-aktivis-rohis-ingin-berjihad-ke-suriah*, diakses 11 Juli 2021.